153.000.000

Rp.





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

Nama : HENRY ISKANDAR MADYANTORO
 Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN

3. NHK : **882250**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.650.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA
 TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 2.457 m2/2.457 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 2.581 m2/2.581 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 329 m2/329 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 517 m2/517 m2 di KAB / KOTA KOTA
TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

 MOBIL, MPNP/MINIBUS AGYA 1,2 G A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

2. MOTOR, HONDA F1CO2N8LA A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

| C. | HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | at at |
|-----------------------------------|------------------------|-----|----------------------------|
| D. | SURAT BERHARGA | Rp. | No. |
| E. | KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 7.353.100 |
| F. | HARTA LAINNYA | Rp. | Kok |
| | Sub Total | Rp. | 1.810.353.100 |
| III. HUTANG | | Rp. | 140.000 <mark>.00</mark> 0 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | | Rp. | 1.670.353.100 |





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

